

BAB 6

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Kimia Farma 119 adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa program studi apoteker yang akan melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) hendaknya lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian dan manajemen apotek sehingga pada waktu pelaksanaan PKP calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut dengan baik, efektif, lancar dan mahasiswa calon apoteker mau terlibat secara aktif.
2. Mahasiswa program studi profesi apoteker hendaknya berperan aktif dan antusias dalam melaksanakan seluruh kegiatan PKPA agar dapat memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek guna membekali diri ketika harus terjun langsung di dunia kerja.
3. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien dapat memahami dan mengerti cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat.
4. Apotek Kimia Farma 119 hendaknya selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja dari setiap individu untuk bekerja secara profesional terhadap tugas

dan tanggung jawabnya masing-masing agar selalu dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan POM RI, 2016. **Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman yang Sering Disalahgunakan**, Badan POM RI, Jakarta.
- BPOM, 2008, **Informatorium Obat Nasional Indonesia**, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian**, Jakarta
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang **Obat Wajib Apotek**.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, **Drug Information Handbook 17th ed.**, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, **AHFS Drug Information**, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Kefarmasian di Apotek**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Menteri kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian**, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang **Izin Produksi Kosmetika**.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tentang **Perubahan Pengglongan Psikotropika**, Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta.

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, **Manajemen Farmasi ed. 3**, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S.C., 2009, **Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.**, Pharmaceutical Press, London.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2009, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, Undang-undang Republik Indonesia